

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

COVID-19 merupakan keluarga besar *coronavirus* yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) yang menular ke manusia melalui infeksi pada sistem pernafasan mulai dari penyakit ringan seperti batuk, pilek, flu, sakit tenggorokan, demam sampai penyakit berat seperti pneumonia. COVID-19 merupakan *zoonosis* yang dapat menular dari hewan ke manusia yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan tepatnya di Tiongkok pada 30 Desember 2019 dan menyebar ke berbagai negara salah satunya adalah negara Indonesia (World Health Organization, 2020).

Menurut Kemenkes (2020) dalam Ferdi (2020) menjelaskan bahwa penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia terjadi pertama kali di Jakarta pada 2 Maret 2020 dan menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional, yang ditandai dari adanya salah satu warga Indonesia yang terkonfirmasi positif karena melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan rantai penularan dan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia meningkat per harinya karena penerapan kebijakan yang masih kurang efektif akibat rendahnya kesadaran diri masyarakat untuk disiplin mematuhi aturan kebijakan yang berlaku.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan dan penyebaran kasus COVID-19 salah satunya dengan menerapkan *social distancing*. COVID-19 juga beresiko adanya gangguan kesehatan, tenaga kerja banyak yang dirumahkan, menurunnya pendapatan, sampai keterpurukan usaha diberbagai sektor karena usaha yang dilakukan tidak berjalan seperti biasanya akibat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 terkait penanganan kasus COVID-19 yang terus meningkat. Di samping itu, aturan kebijakan tersebut juga membuat sektor

pariwisata, sektor manufaktur, sektor transportasi, dan sektor pangan menjadi dirugikan karena terbatasnya kegiatan yang dilakukan di masa pandemi (Kementerian Keuangan, 2020).

Tabel 1.1
Jumlah Kasus COVID-19 di Kawasan Asia Tenggara
Tanggal 15 Oktober 2020

Negara	Total Kasus	Positif	Sembuh	Meninggal
Indonesia	349.160	4.411	273.661	12.268
Filipina	348.698	2.261	294.161	6.497
Singapura	57.892	3	57.52	28
Myanmar	31.325	0	57.752	3
Malaysia	17.540	0	11.605	167
Thailand	3.665	13	3.463	59
Vietnam	1.122	0	1.029	35
Brunei Darussalam	147	0	143	4
Timor Leste	102	0	102	0
Kamboja	23	0	23	0
Laos	9	0	9	0

Sumber: Satgas COVID-19, 2020

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah kepadatan penduduk terbanyak di Kawasan Asia Tenggara, bahkan dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia juga termasuk negara yang memiliki jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Kawasan Asia Tenggara pada tanggal 15 Oktober 2020 sebesar 349.160 orang. Kemudian disusul oleh Filipina dengan total kasus 348.698 orang, lalu Singapura sebesar 57.892 orang, Myanmar sebesar 31.325 orang, Malaysia sebesar 17.540 orang.

Aknolt dalam Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa dampak kasus COVID-19 tidak hanya dirasakan di sektor lokal saja, tetapi sektor global juga ikut merasakan dampaknya karena meningkatnya risiko resesi sehingga menekan pertumbuhan ekonomi di era global yang mengakibatkan terjadinya guncangan

ekonomi (*economic shock*). Kinerja manufaktur dan sektor jasa di beberapa negara ikut mengalami kontraksi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif baik di negara berkembang maupun negara maju.

Sementara itu, Bank Indonesia (2020) mengungkapkan adanya penurunan perdagangan dunia dan harga komoditas serta rendahnya inflasi sebagai akibat dampak dari COVID-19 yang menurunkan permintaan barang-barang ekspor dan impor. Menurunnya volume perdagangan dan harga komoditas menjadi disebabkan karena lemahnya permintaan global. Selain itu, konsumsi rumah tangga Indonesia ikut mengalami perlambatan sebesar 2,48 pada triwulan II 2020 persen lebih rendah dari kinerja pada Triwulan II 2019 sebesar 4,97 persen.

Tabel 1.2
Jumlah Kasus COVID-19 di Indonesia
Tanggal 6 September 2020 (ribu orang)

Pulau	Total Kasus	Positif	Sembuh	Meninggal
Jawa	23.615	15.219	5.877	2.519
Sumatera	7.779	5.932	1.452	395
Bali dan Nusa Tenggara	6.212	1.090	5.017	105
Sulawesi	3.771	2.417	1.184	170
Kalimantan	3.694	2.361	890	196
Maluku dan Papua	1.910	1.288	493	129

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020

Selain itu, data di atas menunjukkan bahwa Pulau Jawa termasuk pulau pertama di Indonesia yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi di antara pulau lainnya pada tanggal 6 September 2020 sebesar 23.615 orang dengan kasus positif sebesar 15.219 orang, kasus sembuh sebesar 5.877 orang, sedangkan kasus meninggal sebesar 2.519 orang. Meningkatnya jumlah kasus ini dipicu setelah adanya libur panjang di akhir bulan Agustus yang menimbulkan kerumunan masyarakat dan mobilitas masyarakat di Pulau Jawa yang cukup tinggi sehingga

resiko penularan dan penyebaran menjadi lebih cepat. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah cepat dalam menangani kasus COVID-19 karena jumlah kasus yang terus meningkat per harinya dengan menerapkan aturan kebijakan baru sebagai langkah pencegahan melalui kebijakan pembatasan mobilitas sosial seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Darurat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020

Berdasarkan data dalam Gambar 1.1 mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun sebelum datangnya pandemi di tahun 2020. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 28,59 juta jiwa dan menurun di tahun 2019 menjadi 25,14 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 26,42 juta jiwa yang artinya terjadi peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Jumlah Kasus COVID-19 Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY
Tanggal 30 September 2020

Kabupaten/Kota	Kasus	Dirawat	Sembuh	Meninggal
Kota Yogyakarta	804	217	561	26
Kabupaten Sleman	1.286	859	409	18
Kabupaten Bantul	512	90	402	20
Kabupaten Kulon Progo	27	13	17	3
Kabupaten Gunungkidul	14	6	8	0

Sumber : Satgas Tanggap DIY, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 kasus COVID-19 tidak hanya berdampak di Indonesia saja, melainkan berbagai wilayah yang ada di Indonesia juga terancam atas guncangan akibat kasus COVID-19 termasuk wilayah DIY karena ribuan masyarakat banyak tertular bahkan sampai ada yang meninggal dunia akibat COVID-19. Akibatnya, pada tanggal 30 September 2020 jumlah kasus COVID-19 di DIY sebesar 2.643 orang yang membuat ketersediaan tempat tidur pasien sudah melebihi kapasitas.



Sumber : BPS DIY, 2020

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di DIY Tahun 2015-2020

Data Gambar 1.2 merupakan data jumlah penduduk miskin di DIY Tahun 2015 sampai tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 550,23 ribu orang mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 sebesar 448,47 ribu orang karena adanya Program Pemulihan Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, aturan kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi ini berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di DIY tahun 2020 sebesar 475,72 ribu orang akibat kondisi perekonomian DIY yang melambat karena sebagian usaha berhenti beroperasi dan mengalami penurunan produksi sehingga banyak terjadi pengurangan tenaga kerja yang memicu bertambahnya angka pengangguran di DIY berdasarkan data dari Sakernas pada Agustus 2020 sebesar 101,85 ribu orang, sedangkan TPAK di DIY sebesar 71,12 persen. Selain itu, DIY merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, Tabel 1.4 menunjukkan Gini Ratio provinsi di Pulau Jawa per Maret tahun 2015 sampai dengan 2020.

Tabel 1.4
Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa per Maret Tahun 2015 – 2020

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	0,433	0,420	0,432	0,441	0,420	0,434
Jawa Tengah	0,380	0,366	0,365	0,378	0,360	0,362
Jawa Timur	0,415	0,402	0,396	0,379	0,370	0,366
Jawa Barat	0,430	0,413	0,403	0,407	0,400	0,403
Daerah Khusus Ibukota (DKI)	0,420	0,411	0,413	0,394	0,390	0,399
Banten	0,402	0,394	0,382	0,385	0,370	0,363
Indonesia	0,408	0,397	0,393	0,389	0,380	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Beberapa provinsi di Pulau Jawa yang memiliki angka ketimpangan di atas Gini Ratio Nasional di antaranya, Provinsi DIY (0,434), Jawa Barat (0,403), DKI Jakarta (0,399). DIY menjadi salah satu provinsi yang memiliki Gini Ratio tertinggi

di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020. Akan tetapi, DIY menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang mengupayakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya untuk mengurangi ketimpangan dengan membuat perencanaan pembangunan yang baik dan tepat seperti pembangunan bandara baru maupun pembangunan jalan tol yang saat ini tengah direalisasikan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Hal ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di DIY baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Namun, adanya kasus COVID-19 yang terjadi di DIY ini justru membuat kondisi perekonomian di DIY mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar 2,69 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 pertumbuhan ekonominya sebesar 6,59 persen. Akan tetapi, DIY mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak kasus COVID-19 terhadap kemiskinan di DIY ?
2. Bagaimana dampak kasus COVID-19 terhadap ketimpangan pendapatan di DIY ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kasus COVID-19 terhadap kemiskinan di DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kasus COVID-19 terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan saat terjadinya kasus COVID-19.
2. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai informasi, referensi, acuan serta literatur bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan di DIY.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dibagi ke dalam 5 bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat landasan teori dan studi terkait atau penelitian terdahulu.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai data dan sumber data, alat analisis serta definisi operasional.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.